

## BAB II

### TELAAH PUSTAKADAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi sangat berperan penting atas aktivitas-aktivitas badan usaha, jika ilmu akuntansi diterapkan dengan baik maka, hasil atau informasi yang akan di dapat baik pula. yang akan digunakan sebagai pengambil keputusan ekonomi bagi pihak intern maupun ekstern dimasa mendatang.

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu informasi keuangan. Sistem informasi menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan serta kondisi bisnis pada suatu waktu dan periode.

Harahap (2005:3) mengemukakan bahwa:

akuntansi tepatnya akuntansi keuangan atau ada juga yang menyebut akunting adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberi informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.

Defenisi akuntansi menurut Menurut Winwin Yadianti dan Ilham Wahyudi (2007:37-38) akuntansi diartikan sebagai berikut:

Suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan menurut Warren Reeve Fess (2006:10) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai:

sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang menghasilkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Arfan Ikhasan (2012:1) akuntansi adalah:

Bahasa untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan perusahaan.

Menurut Accounting Principle Board (APB) dalam Abdul Halim (2007:32) mengatakan akuntansi adalah:

Suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

Menurut Carl S. Warren dkk (2014:3) secara umum akuntansi definisi sebagai berikut:

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan.

Pengertian akuntansi menurut Niswonger et.al. (2006:6) adalah :

Sebagai sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan pengertian akuntansi yang biasa diimplementasikan pada manajemen badan usaha, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi dan akuntansi sebagai suatu teknik prosedur pembukuan transaksi keuangan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi adalah: berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu badan usaha dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diantaranya pihak manajemen, pemilik, pemerintah dan pihak kreditur.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu badan usaha dan akhirnya menginterpretasi laporan tersebut.

## 2. Konsep dan Prinsip dasar Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI: 2013 ETAP.86) konsep dan prinsip yang berlaku dalam akuntansi, yaitu mempertimbangkan sebagai berikut :

### a. Konsep Entitas

Suatu entitas akuntansi adalah suatu organisasi atau suatu bagian dari organisasi yang terpisah dari organisasi lainnya dan individu-individu lainnya yang merupakan suatu unit ekonomi yang terpisah. Dari sudut pandang akuntansi, setiap entitas harus membuat satu garis batas atau pemisah yang jelas di sekelilingnya agar tidak mencampurkan kejadian-kejadian yang dialami oleh entitas-entitas lainnya.

### b. Prinsip Keadilan

Catatan dan laporan akuntansi harus di dasarkan atas tersedia yang paling dapat di andalkan, sehingga catatan dan laporan tersebut akan menjadi akurat dan berguna.

### c. Prinsip Biaya

Prinsip menyatakan bahwa aktiva yang diperoleh harus dicatat menurut harga aktualnya dan juga disebut dengan harga historis.

### d. Konsep Kesenambungan

Sebab yang lain mengapa aktiva harus dicatat menurut harga perolehannya adalah suatu konsep kesinambungan yang menyatakan bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya untuk masa yang tidak dapat ditentukan atau di ramalkan di masa yang akan datang.

### e. Konsep Satuan Moneter

Kita mengasumsikan bahwa daya beli dari rupiah secara relatif adalah stabil. Konsep satuan moneter ini adalah sebagai dasar untuk mengakibatkan adanya efek dari inflasi di dalam catatan akuntansi. Sehingga kita dapat mengurakan atau menambahkan nilai-nilai rupiah yang seolah-olah setiap rupiah tersebut memiliki daya beli yang sama. Para akuntan telah menetapkan cara-cara jika inflasi tersebut harus diperhitungkan. Jika terjadi, maka menurut SAK perusahaan harus menunjukkan nilai-nilai yang telah disesuaikan dengan inflasi dalam laporan-laporan mereka yang menggunakan informasi.

Menurut Suwardjono (2002:99) ada dua macam dasar pencatatan dalam akuntansi yang dipakai dalam mencatat transaksi yaitu :

- a. Dasar kas (cash basis), yaitu pendapatan dan beban di laporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana kas diterima dan dibayar. Laba atau rugi bersih merupakan selisih antara penerimaan kas (pendapatan) dengan pengeluaran kas (beban).  
Misalnya : penghasilan dicatat ketika kas diterima dari klien dan upah dicatat kas dibayar kepada karyawan.
- b. Dasar akrual (accrual basis), yaitu pendapatan dilaporkan laporan laba rugi pada periode dimana pendapatan tersebut dihasilkan (pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat apakah kas diterima atau belum dari pelanggan selama periode ini, dan upah karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode dimana karyawan memberikan jasa dan bukan pada saat upah dibayar).

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Prinsip Akuntansi pada dasarnya meliputi standar atau kebiasaan, kovenensi atau tradisi akuntansi yang berlaku dalam prakteknya. Oleh sebab itu dalam penyusunan prinsip akuntansi harus diperhatikan tujuan yang dicapai, salah satu tujuan dari prinsip akuntansi adalah dapat menyajikan informasi tentang keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan.

### **3. Siklus Akuntansi**

Dalam proses menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahap proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen transaksi, mengklasifikasikan jenis transaksi, menganalisis, meringkas, sehingga melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan demikian, untuk sampai pada tahap penyajian informasi keuangan harus melewati proses yang disebut dengan siklus akuntansi.

Menurut Rudianto (2012:16) siklus akuntansi adalah :

Urutankerja yang harus dilakukan sejak awal sehingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Menurut Donald E. Kieso dkk (2007:7) siklus akuntansi adalah prosedur akuntansi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan.

Menurut Charles T. Horgren (2007:186) yaitu :

Siklusakuntansi dimulai dengan saldo akun aktiva, kewajiban, dan ekuitad pemilik yang tersisa dari periode sebelumnya. Sedangkan menurut Soemarso S.R (2004:90) siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara langsung berulang-ulang dan terus menerus.

Menurut Rudianto (2012:16-17) bagian-bagian siklus akuntansi adalah:

- a. Transaksi  
Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan disalah satu unsur posisi keuangan perusahaan.
- b. Dokumen Dasar  
Dokumen dasar adalah berbagai dokumen yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu.
- c. Jurnal  
Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara kronomigis, sedangkan menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki.
- d. Posting  
Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di Buku Jurnal ke dalam Buku Besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun masing-masing.
- e. Buku Besar  
Buku Besar adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya.
- f. Laporan Keuangan

Pada akhir siklus akuntansi, akuntansi perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan yang berkaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari :

- 1) Laporan laba rugi komprehensif (*Statement of comprehensive income*)
- 2) Laporan perubahan ekuitas (*statement of change in equity*)
- 3) Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*)
- 4) Laporan arus kas (*statement of cash flow*)
- 5) Catatan atas laporan keuangan
- 6) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif

Menurut Robbert Libby dkk (2008:184) langkah akhir dalam siklus akuntansi adalah :

Tutup buku, Tutup buku dilakukan untuk menyiapkan laporan laba rugi pada siklus akuntansi yang akan datang. Oleh karena itu, pada setiap akhir periode saldo dalam rekening temporer akan ditransfer atau ditutup ke rekening laba ditahan dengan membuat jurnal penutup.

Jurnal penutup memiliki dua tujuan yaitu :

- 1) Menrasfer laba atau rugi bersih kedalam rekening laba ditahan.
- 2) Memastikan setiap rekening temporer memiliki saldo nol, agar siap digunakan sebagai sarana akumulasi periode akuntansi berikutnya.

Sedangkan menurut Carl S. Warren dkk (2014:173) langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi kedalam buku jurnal
- 2) Posting transaksi tersebut ke buku besar
- 3) Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan
- 4) Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian
- 5) Menyiapkan kertas kerja akhir periode
- 6) Membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar
- 7) Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan
- 8) Menyiapkan laporan keuangan
- 9) Membuat ayat jurnal, penutup dan posting ke buku besar
- 10) Menyiapkan daftar saldo setelah penutupan

Berdasarkan ditulis diatas dapat disimpulkan bahwa Proses akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang dimulai dari menganalisis transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak tertentu, hal ini harus dilakukan terus menerus dan secara berulang-ulang.

#### **4. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan akuntansi, yaitu aktivitas mengumpulkan dan mengolah data financial untuk disajikan dalam format laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar laporan keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil suatu keputusan.

Menurut Rudianto (2012:20) catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang dipergunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.

Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: (a). tidak memiliki akuntabilitas signifikan; dan (b). menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkt kredit, (IAI: 2013ETAP. 11).

Menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.1) entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:(a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal; atau (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Karakteristik laporan keuangan menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.3) sebagai berikut: (1) dapat dipahami; (2) relevan; (3) materialitas; (4) keandalan; (5) substansi mengungguli bentuk; (6) pertimbangan sehat (7) kelengkapan; (8) dapat dibandingkan; (9) tepat waktu; dan (10) keseimbangan antara biaya dan manfaat.

Tujuan umum laporan keuangan menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.3) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi kebutuhan tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.12) menjelaskan bahwa laporan keuangan badan usaha terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - 1) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
  - 2) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kepastiaanya sebagai peilik.
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan. Yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

## 5. Penyajian Neraca

Neraca merupakan salah satu dari unsur laporan keuangan yang menjelaskan tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Laporan keuangan dapat diidentifikasi sebagai laporan yang menyajikan hubungan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada waktu tertentu

Menurut Charles T. Horgren (2007:19) neraca adalah : Potret entitas berupa laporan posisi keuangan menyajikan daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu entitas pertanggal tertentu, biasanya pada akhir bulan atau tahun tertentu. Sedangkan menurut Donald E. Kieso dkk (2007:190) neraca adalah sebagai berikut : Neraca (Balance Sheet) yang kadang-kadang disebut juga laporan posisi keuangan, melaporkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas perubahan bisnis pada suatu tanggal tertentu.

Unsur terpenting dalam penyajian neraca adalah aktiva (aset) dan kewajiban (liabilities). Informasi yang di sajikan dalam neraca menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.15) bahwa neraca minimal mencakup pos-pos berikut: (a) kas dan setara kas; (b) piutang usaha dan piutang lainnya; (c) persediaan; (d) popertiinvestasi; (e)

aset tetap; (f) aset tidak berwujud; (g) utang usaha dan utang lainnya; (h) aset dan kewajiban pajak; (i) kewajiban diestimasi; (j) ekuitas.

SAK ETAP tidak menemukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. Paragraph 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca (IAI:2013 ETAP.16)

**a. Aktiva (aset)**

Kelompok utama dari sumber daya yang dimiliki perusahaan diwujudkan dalam aktiva (aset) perusahaan (sering juga di sebut sebagai harta atau kekayaan perusahaan). Aktiva adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis yang dapat membantu perusahaan dalam menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keiso et.al (2007:193) mengidentifikasi suatu aktiva adalah :

Sebagaimana manfaat ekonominya yang mungkin diperoleh di masa depan, atau di kendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian yang lalu.

Menurut Walterr T. Harrison dkk (2012:11) aktiva adalah :

Sumberdaya ekonomi yang dikendalikan entitas yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang bagi entitas.

Menurut Arfan Ikhasan (2012:2) asset adalah :

Kas dan aktiva-aktiva lain yang dapat ditukar menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau lebih dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan.

Keiso et.al (2007:193) mengungkapkan bahwa :

Aktivayang terdapat dalam badan usaha berbentuk koperasi biasanya terdiri dari pos-pos seperti: aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain.

Menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.8) aset di akui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat di ukur dangan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir kedalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Definisi aktiva (aset) menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.5) yaitu suatu sumberdaya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan memperoleh entitas.

Menurut pernyataan IAI (IAI:2013ETAP.15),suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut: (1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk di jual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; (2) dimiliki untuk diperdagangkan; (3) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau (4) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaanya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

### 1) Aktiva lancar

Aktiva lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat di cairkan menjadi kas, dijual, atau di konsumsi dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam siklus operasi perusahaan yang normal jika, lebih dari satu tahun Menurut Donald E. Kieso dkk (2007:193) aktiva lancar adalah kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan dapat dari dokumen menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam salah satu siklus operasi, tergantung mana yang paling lama.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI: 2013 ETAP.15) entitas mengklasifikasikan aset lancar jika :

- a) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus normal entitas.
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan
- c) Diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka 12 bulan setelah akhir periode laporan. Berupa kas atau setara kas kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau dilaporkan untuk menyelesaikan kewajiban atau setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

### 2) Aktiva tetap

Aset tetap merupakan aktiva yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang waktu pemakaiannya yang panjang, memiliki nilai besar dan tidak untuk dijual dalam kegiatan perusahaan.

Menurut Michell Suhari (2006:259) aktiva tetap adalah harta berwujud (tangible assets) yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, dan digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan.

Menurut Charles T. Horgren (2007:198) aset tidak lancar adalah aktiva yang tidak dimiliki didefinisi aktiva lancar. Aktiva tetap memiliki beberapa karakteristik khusus yaitu :

- a) Aktiva tetap relatif mahal
- b) Aktiva tetap dapat digunakan dalam jangka panjang
- c) Aktiva tetap dapat dijual atau ditukar tambah

Menurut Soemarso (2005:20) Aktiva Tetap Berwujud (*Tangible Fixed Assets*) adalah :

Aktiva berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar.

### 3) **Kewajiban (Liabilitas)**

Kewajiban merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak luar yang timbul akibat transaksi perolehan sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga mengakibatkan arus kas keluar dimasa yang akan datang.

Menurut Michell Suhari (2006:12-13) terdapat tiga karakteristik dari liabilitas yaitu:

1. Suatu liabilitas mengharuskan bahwa suatu entitas menyelesaikan kewajiban sekarang ini dengan mentransfer asset dari masa depan atas permintaan/laba suatu peristiwa tertentu terjadi pada suatu waktu tertentu.
2. Kewajiban itu tidak dapat dihindari.
3. Peristiwa yang menimbulkan kewajiban entitas tersebut telah terjadi di masa lalu.

Kewajiban Terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kewajiban Lancar  
Kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun akuntansi
- b. Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban jangka panjang merupakan pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaan dengan tempo pembayaran lebih dari satu periode, atau dalam waktu yang lama.

Menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.72) kewajiban klasifikasi instrument keuangan dibentuk berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi (contractual arrangement on initial recognition). Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrument mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya dimasa yang akan datang, maka instrument keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Sedangkan Menurut Charles T. Horngren (2007:11) kewajiban adalah utang yang harus dibayar kepada pihak luar, yang disebut kreditor.

Dalam SAK ETAP (IAI: 2013 ETAP.15) kewajiban jangka pendek adalah

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan
- c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

#### **4) Modal (Ekuitas)**

Modal merupakan jumlah nilai kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam sumber daya ekonomi perusahaan atau merupakan selisih antara harta dan kewajiban.

Menurut Walterr T. Harison dkk (2012:3) ekuitas adalah

Kepentingan residu dalam asset entitas setelah dikurangi kewajiban entitas dan mempresentasikan klaim residu pemegang saham atas aset entitas.

Penyajian modal menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.74) yaitu:

- a. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.

- b. Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca.
- c. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas deviden dan pelunasan modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan.
- d. Dalam hal terdapat tunggakan deviden atas saham preferen dengan hak deviden kumulatif, jumlah tunggakan setiap saham dan jumlah keseluruhan deviden periode sebelumnya di ungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
- e. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- f. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban.

#### 6. Penyajian Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memberikan informasi pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam periode tertentu yang biasanya dalam waktu satu bulan ataupun tahun.

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dkk (2014:17) laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan :

- a. Konsep penandingan (matching concept)  
Konsep penandingan disebut juga konsep pengaitan atau pepadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait.
- b. Laba Bersih (Net Profit)  
Jika pendapatan lebih besar dari pada beban.
- c. Rugi Bersih (Net Loss)  
Jika beban melebihi pendapatan

Menurut IAI (IAI: 2013 ETAP.19) laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut ini :

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Laba atau rugi neto;

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.

Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

### **7. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas**

Menurut Arfan Ikhsan (2012:40) laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format

laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut SAK ETAP (IAI: 2013 ETAP.21).

### **8. Penyajian Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas

yang menimbulkan perubahan dalam ukuran dan komposisi setoran ekuitas dan pinjaman entitas.

Menurut Ismail (2009:23) laporan arus kas merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan aktivitas keuangan yang terkait dengan transaksi tunai.

Menurut Arfan Ikhsan (2012:177) laporan arus kas adalah satu dari laporan keuangan dasar. Laporan arus kas dibuat memenuhi beberapa tujuan berikut ini :

- a. Untuk memperkirakan arus kas masa datang.
- b. Untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen.
- c. Untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar deviden kepada pemegang saham, pembayaran bunga dan pokok pinjaman kepada kreditor.
- d. Untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan.

Dalam menyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi, dapat dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung. Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan SAK ETAP (IAI: 2013 ETAP.24).

Dalam menyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, dapat dilakukan dengan cara entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha di sajikan secara terpisah dan di klasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi ( IAI: 2013 ETAP.24).

## 9. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan ETAP (IAI:2013 ETAP.27) catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosures) yang memuat:

- a. Catatan Atas Laporan Keuangan harus:
  - 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
  - 2) Mengungkapkan informasi yang di syaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak di sajikan dalam laporan keuangan, dan
  - 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan memahami laporan keuangan.
- b. Pengungkapan kebijakan akuntansi Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan;
  - a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; dan
  - b) kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.
- c. Pengungkapan informasi lain, antara lain :

Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi yang mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidak pastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai resiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya.

## 10. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dapat di definisikan:

- 1) Badan Usaha adalah suatu kesatuan yang mendirikan kegiatan usaha untuk mencapai keuntungan.
- 2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan adat isdiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan NKRI.
- 3) BUMDes adalah lembaga ekonomi atau kegiatan ekonomi yang dimiliki pemerintah desa dan dikelola masyarakat desa.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desadalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan desa. Dengan kata lain BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Permendagri no 39 tahun 2010; Pasal 1:6)

BUMDes didirikan dalam rangka menopang perekonomian desa untuk lebih mandiri. Sejak di tuangkan dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan, BUMDes memang telah banyak dibentuk diberbadai daerah, termasuk di Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, yang didirikan pada bulan Mei tahun 2007, Berawal dari program pemberdayaan Desa (PPD) berupa UED-SP selanjutnya dirubah dan diresmikan menjadi BUMDes pada bulan November tahun 2010.

Pengertian tentang Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) yaitu merupakan lembaga keuangan mikro yang mengelola usaha simpan pinjam di perdesaan, milik pemerintah desa yang dikelola oleh masyarakat desa, UED-SP yang merupakan program pengembangan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat yang diprioritaskan kepada masyarakat desa dengan ekonomi lemah, guna memberikan peluang untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. UED-SP berkedudukan di desa dan merupakan Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya terpisah dengan pemerintah desa.

Ciri-ciri UED-SP yaitu:

1. Milik desa dan terpisah dari kekayaan desa.
2. Dibawah naungan LKMD/LPM dengan organisasi yang sederhana.
3. Tumbuh dari bawah berdasarkan gotong-royong atau kebersamaan dan saling percaya.
4. Pemberi kredit mudah, murah, ringan cepat dikelola dengan keuangan formal (administrasi pembukuan)
5. Keberadaannya dalam suatu batas wilayah administrasi desa.

Menurut peraturan Menteri dalam negeri No.6 Tahun 1998 Usaha Ekonomi Desa (UED) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan.

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri keuangan, Menteri dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia No :351.1/KMK.010/2009, No : 900-639A TAHUN 2009, No: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, No : 11/43A/KEP.GBI/2009, UED-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk atas inisiatif pemerintah daerah atau masyarakat.

Dari beberapa pengertian UED-SP tersebut, dapat disimpulkan bahwa UED-SP adalah lembaga mikro (LKM) yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat untuk memberikan jasa simpan pinjam maupun jasa konsultasi pengembangan usaha kepada masyarakat desa yang sekaligus sebagai anggota untuk usaha skala mikro dan tidak untuk mencari keuntungan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1998 tujuan dan sasaran Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) adalah :

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan
2. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/kelurahan.
4. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintahan dan atau dari sumber-sumber lain yang sah.

Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

UED-SP Mengalami perubahan status menjadi BUMDes, rata-rata lembaga mikro desa itu memiliki modal awal berkisar Rp 300,000,000,- sampai Rp 550,000,000,- BUMDes telah memiliki legalitas dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan BUMDes maka dianggap perlu untuk terus menggiatkan lahirnya BUMDes-BUMDes baru yang berbasis desa dengan mengacu pada Permendagri nomor 39 tahun 2010. Kemudian untuk menunjang kelancaran aktivitasnya perlu adanya pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaannya. Untuk itu, sebagai legalitas kedudukannya didesa, BUMDes didirikan berdasarkan peraturan desa. Proses pendirian BUMDes dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan berikut :

- 1) Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa berdasarkan musyawarah warga desa
- 2) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- 4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat
- 7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh ketentuan pemerintah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan

Menteri Dalam Negri (Permendagri), Peraturan Daerah (Perda), serta Peraturan Bupati (Perbub). secara rinci tentang landasan hukum BUMDes tersebut adalah:

- 1) UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah; pasal 21 ayat (1) “Desa dapat Mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.
- 2) PP No. 72 tahun 2005 tentang desa, sebagaimana pasal-pasal berikut:

a) Pasal 78 ayat

(a) Ayat (1)

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi desa

(b) Ayat (2)

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(c) Ayat (3)

Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus berbadan hukum.

b) Pasal 79

(a) Ayat (1)

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa

(b) Ayat (2)

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari; a) Pemerintah Desa, b) Tabungan Masyarakat, c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, d) Pinjaman, dan/atau e) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

a) Pasal 80

(a) Ayat (1)

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(b) Ayat (2)

Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD.

b) Pasal 81

(a) Ayat (1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(b) Ayat (2)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ;

- 1) Bentuk dan Badan Hukum;
- 2) Kepengurusan;
- 3) Hak dan Kewajiban;
- 4) Permodalan;

- 5) Bagi Hasil Usaha dan Keuntungan;
- 6) Kerjasama dengan pihak ketiga;
- 7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

#### **B. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta di dukung oleh landasan teoritis yang telah di kemukakan pada telah pustaka, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Mawar Indah Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum”.